

PERPINDAHAN IBUKOTA RI DARI JAKARTA KE YOGYAKARTA PADA 4 JANUARI 1946

Henni Triyana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail : tri3_yana@yahoo.com

Suparwoto

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Yogyakarta merupakan wilayah kesultanan yang mempunyai nilai budaya dan sejarah tinggi sehingga memiliki kedudukan istimewa di antara beberapa wilayah di Indonesia dengan status Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta berperan penting sebagai tempat melanjutkan perjuangan kemerdekaan RI dari penjajah. Masalah dalam penelitian ini adalah latar belakang perpindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta, alasan Yogyakarta yang dipilih sebagai ibukota RI, dampak perpindahan ibukota RI ke Yogyakarta bagi pemerintah RI, dan dampak perpindahan ibukota RI ke Yogyakarta bagi Kesultanan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta terjadi pada tanggal 4 Januari 1946 disebabkan oleh suasana Jakarta yang tidak aman bagi roda pemerintahan saat itu. Alasan dipilihnya Yogyakarta sebagai ibukota RI karena Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan agar ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Setelah Yogyakarta menjadi ibukota RI, Yogyakarta menjadi papan catur bagi politik diplomasi RI.

Kata Kunci: perpindahan, ibukota, pemerintahan.

Abstract

Yogyakarta sultanate is a region that has a high historical and cultural value that has a special position among several regions in Indonesia with status of Yogyakarta. Yogyakarta sultanate played an important role as a place to continue the struggle for independence from the colonizers. The problems studied in this research is what the background of the displacement of the capital of Indonesia from Jakarta to Yogyakarta, the reasons Yogyakarta chosen as the capital of Indonesia, the impact of capital transfer to the government of Indonesia to Yogyakarta Indonesia, and the impact of capital movement RI to the Sultanate of Yogyakarta. The displacement of the Indonesian capital of Jakarta to Yogyakarta occurred on 4 January 1946 due to the atmosphere of Jakarta is not safe for the moment the wheels of government. The reason for choosing Yogyakarta as the capital of Indonesia because Sultan Hamengkubuwono IX proposed that the capital was moved to Yogyakarta. Once the capital of the Republic of Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta became a political chess board for RI diplomacy.

Keywords: migration, capital, government.

PENDAHULUAN

Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia telah mencapai titik kulminasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan telah

dicapai namun perjuangan belum selesai. Kemerdekaan harus ditegakkan dan dipertahankan sebab tantangan dan ancaman masih menghadang baik dari dalam maupun luar negeri. Di seluruh wilayah Indonesia rakyat bangkit

untuk mewujudkan kedaulatan negerinya dengan pengambil alihan kekuasaan dari pihak Jepang.

Perpindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 merupakan peranan Kesultanan Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta juga sebagai papan catur bagi politik diplomasi RI dimulai dari perjanjian Hooge Veluwe, Linggajati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar.¹ Bahkan Kaliurang beberapa kali dijadikan tempat negosiasi awal untuk merancang perundingan antara RI dan Belanda.

Perundingan delegasi antara Belanda dan RI tidak berhasil. Belanda pasti merencanakan suatu tindakan kepada RI. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang Yogyakarta yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Sebelum serangan militer Belanda kedua tersebut, RI sudah bersiap-siap untuk membentuk pemerintah darurat. Presiden dan Wakil Presiden melalui radiogram memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), namun belum sempat diterima. Walaupun belum menerima mandat, Mr. Syafruddin Prawiranegara tetap membentuk PDRI.² Yogyakarta dijadikan sebagai ibukota RI menjadi kenangan yang tidak akan terhapuskan dalam sejarah Indonesia. Selain itu, peristiwa Serangan Umum TNI 1 Maret 1949 menunjukkan eksistensi Kesultanan Yogyakarta sebagai penjaga kelangsungan RI yang menyebabkan dukungan dari dunia internasional semakin besar kepada RI. Dipilihnya Yogyakarta sebagai ibukota RI dan nasib bangsa Indonesia tanpa adanya pemindahan ibukota RI ke Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri untuk ditulis.

METODE

Metode penelitian yang digunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.³ Sumber utama yang berhasil dikumpulkan antara lain berupa arsip Penyambutan kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta, *Berita Antara* 5 Januari 1946, *Berita Indonesia* 5 Januari 1946, *Kedaulatan Rakjat* 5 Januari 1946, *Merdeka* 5 Januari 1946, *Min Poo* 5 Januari 1946, dan *Ra'jat* 5 Januari 1946.

¹ Kolumnis dan Wartawan Kompas, *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat*, (Jakarta : Buku Kompas, 2012), hlm. 179.

² Ardian Kresna, *Sejarah Panjang Mataram : Menengok Berdirinya Kesultanan Yogyakarta*, (Yogyakarta : Diva Press, 2011), hlm. 317.

³ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya : Unesa University Press, 2005), hlm: 11.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta Ke Yogyakarta

Pada tanggal 16 September W.R. Patterson, wakil utama panglima SEAC (*South East Asia Command*) mendarat di Tanjung Priuk dengan kapal Cumberland. Dalam kapal itu ternyata turut serta bekas Gubernur Jawa Timur Ch. O. Van Der Plas dalam kedudukannya sebagai kepala NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) dan juga sebagai wakil utama dari Van Mook.⁴ Hal tersebut mengejutkan pemerintah dan menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat setelah melihat kedaulatan tanah airnya dianggap remeh oleh Sekutu.

Pemuda-pemuda Markas Menteng 31 akan menyelenggarakan rapat umum di Lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 untuk membulatkan tekad rakyat dan mengkonsolidasi kemerdekaan yang akan menghadapi ujian berat. Rapat tersebut bertujuan agar para pemimpin RI dapat berbicara di hadapan masyarakat. Rencana itu dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu persiapan pengerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada Presiden.

Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri menuju ke Lapangan Ikada. Pada waktu itu massa telah berkumpul dengan membawa berbagai macam senjata tajam. Tampak pula pasukan-pasukan Jepang dengan bayonet terhunus disamping tank-tanknya. Mobil Presiden dan Wakil Presiden sebelum memasuki lapangan ditahan sebentar oleh komandan jaga. Mereka saling mengadakan pembicaraan kemudian diperbolehkan meneruskan perjalanan. Bung Karno langsung menuju panggung, berpidato singkat. Ia meminta kepercayaan dan dukungan rakyat kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan kebijaksanaan-kebijaksanaannya, dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Kemudian massa diperintahkan bubar dengan tenang. Ternyata perintah itu ditaati. Rapat raksasa 19 September 1945 itu adalah manifestasi pertama dari pada kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya.⁵

Republik Indonesia menghadapi persoalan dengan Jepang belum selesai, menyusul masuknya tentara Sekutu/Inggris berikutnya. Pada tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu/Inggris mendarat di Jakarta pada jam 10.00 dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison, panglima besar AFNEI (*Allied Forces*

⁴ Sidik Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, (Jakarta : Pustaka Pena, 2000), hlm. 117.

⁵ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hlm. 101 - 102.

Netherlands East Indies). Tentara tersebut terdiri dari tiga divisi, yaitu :

- “(1) 23rd India Division dibawah pimpinan Jenderal Mayor D. C. Hawthorn (untuk daerah Jakarta),
- (2) 5th India Division dibawah pimpinan Jenderal Mayor E. C. Mansergh (untuk daerah Surabaya),
- (3) 26th India Division dibawah pimpinan Jenderal Mayor H. M. Chambers (untuk daerah Sumatera, di Padang atau di Medan).”⁶

Dalam rombongan ini turut beberapa orang dari markas besar tentara Belanda dengan 1 (satu) kompi tentara serdadu-serdadu Ambon.

Kedatangan Sekutu/Inggris awalnya dirasakan sebagai bahaya, tetapi mengingat tugas Sekutu/Inggris sebagaimana disiarkan oleh radio SEAC (*South East Asia Command*) di Singapura adalah melindungi dan mengepakir tawanan-tawanan perang (*prisoner of war*) dan tawanan-tawanan biasa, melucuti senjata-senjata dan mengembalikan serdadu Jepang, dan menjaga keamanan dan ketentraman agar kedua maksud itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.⁷

Pada tanggal 29 September 1945 Letnan Jenderal Sir Philip Christison menegaskan bahwa pemerintah Inggris tidak mempunyai maksud untuk mencampuri politik dalam negeri Indonesia, tetapi hanya menghendaki ketertiban dan keamanan. Sehubungan dengan penegasan pimpinan Sekutu tersebut, maka Presiden Soekarno pada tanggal 30 September 1945 mengumumkan supaya rakyat jangan menghalangi tentara Sekutu/Inggris.⁸

Kedatangan NICA (*Netherland Indies Civil Administration*)/Belanda membonceng Sekutu/Inggris ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Belanda menganggap bahwa Indonesia masih merupakan negara jajahannya. Belanda tidak segan-segan untuk melaksanakan teror-terornya kepada para pemimpin bangsa Indonesia, termasuk kepada Soekarno – Hatta, Syahrir, dan lain-lain.⁹ Belanda meluaskan daerah kekuasaan dan tidak sedikit pula tambahan kekuatan tentara Belanda dikirim ke Indonesia untuk masuk ke Jakarta sehingga bentrokan sering terjadi.¹⁰

⁶ Osman Raliby, *Documenta Historica : Sejarah Dokumenter Dari Pertumbuhan Dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1953), hlm. 36.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

⁹ *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1997), hlm. 338.

¹⁰ G.A Warmansjah, *Sejarah Revolusi Fisik Daerah DKI Jakarta*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1997), hlm.125 – 126.

Kedatangan NICA (*Netherland Indies Civil Administration*)/Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali dihadapi melalui perundingan. Badan Pekerja KNIP mengusulkan agar dibentuk Kabinet Parlemen untuk menangkis serangan-serangan dari luar terhadap Soekarno yang selalu dicela sebagai kolaborator Jepang. Pada tanggal 14 November 1945 Soekarno mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri Kabinet Parlemen. Syahrir dari Partai Sosialis berpendapat bahwa Kabinet Republik Indonesia dibawah pimpinan Syahrir memudahkan berunding dengan Belanda.¹¹

Kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh Sekutu/Inggris dan NICA/Belanda di Jakarta, antara lain : Wilayah Jakarta Utara sebagai daerah pantai menjadi sasaran pendaratan Sekutu/Inggris dan NICA/Belanda, maka wilayah tersebut terutama wilayah Tanjung Priuk menjadi garis terdepan pertahanan RI di Jakarta. Setibanya Sekutu/Inggris dan NICA/Belanda di Jakarta pada tanggal 29 September 1945, Inggris dan Belanda harus mengadakan perjanjian kerjasama dengan Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang merupakan pejuang-pejuang digaris terdepan. Pada saat itu BBI berada di Tanjung Priuk. Perjanjian kerjasama itu atas dasar persetujuan Menteri Perburuhan Indonesia yang pada waktu itu dipegang oleh Mr. Wilopo. Dalam perjanjian tersebut disyaratkan antara lain :

- “(1) Pihak Sekutu harus mengakui bahwa kekuasaan berada pada bangsa Indonesia,
- (2) Penjagaan keamanan harus dilakukan oleh Kepolisian Negara dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut,
- (3) Setiap permintaan tenaga harus melalui Perwakilan Pemerintah RI yang ada di Tanjung Priuk,
- (4) Biaya pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan.”¹²

Perjanjian tersebut tidak berjalan lancar karena perbuatan Sekutu/Inggris dan NICA/Belanda yang menghina para buruh, namun mereka tidak dapat menyangkal bahwa Indonesia sudah dikuasai oleh putranya sendiri. Tujuan Sekutu/Inggris untuk melucuti tentara Jepang tidak dapat segera dilaksanakan karena pelucutan tentara Jepang di Tanjung Priuk sudah terlebih dahulu dilakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia yang gagah berani dalam suatu penyerangan ke markas tentara Jepang di stasiun Tanjung Priuk. Hasil keseluruhan dari serangan itu ialah 20 pucuk senjata, sejumlah peluru, dan 10 ton beras.¹³

¹¹ Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta : Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 480.

¹² Hadisutjipto, *Bara Dan Nyala Revolusi Fisik Di Jakarta*, (Jakarta : Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1995), hlm. 50.

¹³ *Ibid.*, hlm. 51.

Pada bulan Desember 1945, buruh-buruh berhasil merebut dua buah kapal torpedo Belanda dari pelabuhan Tanjung Priuk ke perairan Kerawang kemudian ke Cirebon. Para buruh juga mengambil barang-barang seperti mesin bubut, alat-alat listrik dan lain-lainnya dari perbengkelan dibawa ke daerah Kerawang. Pihak musuh terus menerus melakukan operasi, sehingga sebagian besar dari Barisan Buruh Indonesia (BBI) pindah dari Cirebon ke daerah Banten, diantaranya ada yang menggabungkan diri dengan ALRI Pangkalan I Hasbullah dan badan-badan perjuangan lainnya. Para pejuang yang masih bertahan di Tanjung Priuk antara lain Ismail, Suria Rakhman, dan Tb. Moh. Maksu yang mengkoordinir gerakan di bawah tanah serta berhubungan dengan pejuang-pejuang lainnya yang ada di luar kota.

Pertahanan RI di wilayah utara semakin terdesak karena teror-teror Sekutu/Inggris dan NICA/Belanda, sehingga pertempuran melebar ke wilayah Jakarta Timur sampai Bekasi. Pertempuran-pertempuran dahsyat terjadi di daerah Bekasi dan sekitarnya berlangsung antara bulan Desember 1945 hingga bulan Juli 1947.¹⁴ Wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Tambora berdiri sebuah monumen yang menjadi saksi perjuangan rakyat di wilayah tersebut. Riwat berdirinya monumen tersebut berawal pada bulan Desember 1945, melintas dua buah truk patroli Belanda dari arah kelurahan Tanah Sereal menuju kelurahan Jembatan Lima. Tiba-tiba truk tersebut dilempar dua buah granat, tetapi tidak ada korban jiwa pihak musuh. Sebaliknya musuh segera mengejar orang yang melempar granat hingga sampai di jalan Kramat.¹⁵ Disitu terjadi bentrokan antara pasukan NICA/Belanda dengan Gerakan Angkatan Muda Rakyat (GAMR). Dalam pertempuran tersebut telah gugur Syapri bin Sarkani dari GAMR dan 4 orang biasa. Pada tanggal 12 Desember 1945 terjadi lagi pertempuran antara GAMR yang mempertahankan Pos Duri dengan NICA/Belanda yang ingin merebut pos tersebut. Korban dari pihak musuh tidak dapat diketahui, sebaliknya dari pihak GAMR telah gugur Moh. Sapri, Ma'rup, Suntar, Amat, dan Haji Kasrian. Peristiwa tersebut tidak pernah dilupakan oleh rakyat Tambora dan sekitarnya. Untuk menghormati arwah para pahlawannya, akhirnya masyarakat setempat sepakat untuk mendirikan tugu peringatan.

Wilayah Jakarta Selatan telah dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Kalibata yang bermarkas di pabrik sepatu Bata pada bulan Oktober 1945. Belanda yang telah mengetahui keberadaannya segera menyerbu kesana. Pasukan BKR yang kalah persenjataan terpaksa

lari ke jurusan Pasar Minggu dan bermarkas di Gedung Item. Di pos yang baru dibentuk Barisan Pelopor dan Barisan Merah yang bermarkas di Tanjung Barat Klenteng Agung. Terdapat pula pemuda-pemuda Islam yang tergabung dalam pasukan Sabilillah yang dipimpin oleh Mohammad, Mohammad Anwar, Mohammad Amin, dan Ishak yang bermarkas di masjid Kalibata. Pada suatu hari pasukan Sabilillah berhasil menangkap dua orang kaki tangan Belanda bernama De Fretes dan Watimena. Kedua orang kaki tangan Belanda tersebut dipenggal lehernya di Kalibata Selatan. Akibat peristiwa tersebut Belanda melakukan operasi terus menerus di Kalibata dan Pasar Minggu hingga berhasil menangkap Mohammad Anwar. Kemudian Belanda berhasil menangkap Mohammad di Pasar Minggu.¹⁶

Pada tanggal 20 November 1945, kantor polisi di Pasar Baru, Jakarta Pusat, ditembak oleh serdadu NICA/Belanda yang datang dari arah Pasar Baru. Setelah polisi datang mereka melarikan diri. Pada tanggal 28 November 1945, di daerah Pasar Senen, terjadi bentrokan disebabkan oleh serdadu-serdadu NICA/Belanda. Pertempuran antara Belanda dan rakyat dimulai dari Stasiun Lama, ke Kramat Pulo, Pasar Gablog, dan Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi tentara Belanda mencoba membakar pasar, tetapi tidak berhasil karena kesigapan penduduk yang dapat segera memadamkan api.¹⁷

NICA/Belanda berusaha menangkap Presiden Soekarno selain melakukan kerusuhan di berbagai wilayah Jakarta. Belanda berkali-kali memasang perangkap untuk membunuh Soekarno, sehingga terpaksa tiap malam Soekarno harus tidur berpindah-pindah tempat. Soekarno memilih rumah orang-orang yang dapat dipercaya dan secara bergiliran tidur di rumah mereka. Setelah jam enam sore jalanan tidak aman. Soekarno menyamar sebagai sopir atau pekerja kasar dengan memakai sarung dan blangkon. Soekarno berjalan seperti orang pincang atau cara lain agar tidak diketahui oleh tentara Belanda. Soekarno mengetuk pintu rumah yang dituju dengan sangat pelan. Kadang-kadang tidak ada orang yang mau menjawab karena takut dengan orang yang tidak dikenal.¹⁸

Situasi Jakarta yang tidak aman maka dianggap waktunya ibukota RI berhijrah ke kota yang lebih aman untuk melakukan pimpinan perjuangan. Pada tanggal 3 Januari 1946 Presiden Soekarno mengumumkan kepada para menteri, pengawal, dan pembantu-pembantu yang setia bahwa kedudukan pemerintahan harus dipindahkan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁵ Osman Raliby, *op. cit.*, hlm. 81.

¹⁶ Hadisutjipto, *op. cit.*, hlm. 67.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁸ Cindy Adams, *Bung Karno : Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung, 1966), hlm. 348.

ke daerah yang bebas dari gangguan Belanda.¹⁹ Pemerintah RI memutuskan untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta.²⁰ Soekarno-Hatta meninggalkan Jakarta diikuti oleh pimpinan-pimpinan pemerintahan pusat.²¹ Sedangkan Perdana Menteri Syahrir tetap tinggal di Jakarta dalam rangka melaksanakan tugasnya.

A. Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta Ke Yogyakarta

Yogyakarta dipilih sebagai ibukota RI berdasarkan pertimbangan adanya dukungan dari Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman serta rakyat Yogyakarta terhadap Pemerintah RI. Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 segera tersiar ke seluruh pelosok tanah air. Tersiarnya berita proklamasi kemerdekaan di Yogyakarta didengar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian Sultan mengundang Paku Alam VIII, Ki Hadjar Dewantara, dan beberapa tokoh lain untuk membicarakan tentang berita proklamasi kemerdekaan. Pertemuan tersebut akhirnya mendapat kesimpulan bahwa rakyat Yogyakarta menyambut proklamasi dengan rasa puas dan lega.²² Pada tanggal 19 Agustus 1945 tanpa ragu-ragu sedikitpun Sultan memerintahkan KRT. Honggowongso untuk mengirim telegram kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta berupa ucapan selamat atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan selamat atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Hal ini menunjukkan bahwa Kesultanan Yogyakarta sebagai wilayah dengan kekuasaan monarki yang pertama kali mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 itu juga Sultan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di Bangsal Kepatihan. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut terdiri dari tokoh agama, nasionalis, kepanduan, dan keturunan Tionghoa. Pertemuan langsung dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu dihadiri sekitar 100 orang pemimpin kelompok pemuda. Dalam pertemuan itu Sultan meminta para pemuda supaya menjaga keamanan

masyarakat.²³ Selanjutnya para pemuda menghimpun rakyat dalam organisasi-organisasi seperti Pembela Tanah Air (Peta), Heiho, Seinendan, dan sebagainya membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Yogyakarta. Tujuan BKR menjamin ketentraman dan keselamatan rakyat dan KNID untuk menyalurkan serta memperjuangkan secara politis segala keinginan rakyat disamping mendampingi pemerintah. Perkumpulan yang dihadiri tokoh-tokoh Yogyakarta diduga sebagai upaya konsolidasi untuk menyatukan sikap dan pandangan dalam menentukan sikap Yogyakarta terhadap terbentuknya Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 juga Badan Kebaktian Rakyat (Hokokai) Yogyakarta mengadakan sidang istimewa yang bertempat di gedung Sono Budoyo. Dalam sidang itu diambil keputusan sebagai berikut: (1) melahirkan rasa gembira dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas lahirnya Negara Republik Indonesia; (2) menyatakan dengan keyakinan seteguh-tegunya kepada Pemerintah Indonesia, dan akan mengikuti tiap-tiap langkah perintahnya; (3) mohon kepada Illahi agar Negara Indonesia berdiri kokoh, teguh, dan abadi.²⁴ Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Yogyakarta secara resmi menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia.

Telegram yang dikirimkan Sultan dan Paku Alam VIII kepada Presiden dan Wakil Presiden RI serta pertemuan yang diadakannya dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan jelas mencerminkan sikap penguasa Yogyakarta yang mendukung kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Untuk mempertegas sikap itu dan agar diketahui oleh lingkungan yang lebih luas, maka Sultan Hamengkubuwono IX memberikan sambutan yang dimuat di surat kabar *Sinar Matahari* yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1945. Sambutan tersebut dinilai sebagai upaya menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 20 Agustus 1945 Sri Sultan dan Paku Alam VIII kembali mengirim telegram ditujukan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam telegram itu Sultan menegaskan sanggup berdiri di belakang kepemimpinan Soekarno dan Moh. Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden RI.²⁵

Kesultanan Yogyakarta menunjukkan komitmen yang besar dalam upaya mendukung Republik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada tanggal 5 September 1945 dengan memperhatikan keinginan dan desakan rakyat,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 352.

²⁰ Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 – 1950, (Jakarta : Badan Pimpinan Harian Pusat (BPHP) Korp Cacat Veteran Republik Indonesia, 1975), hlm. 47.

²¹ Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raja*, (Jakarta : Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 78.

²² Kolumnis dan Wartawan Kompas, *op. cit.*, hlm. 200.

²³ Badan Musyawarah Musea DIY, *Sejarah Perjuangan : Yogya Benteng Proklamasi*, (Yogyakarta : Badan Musyawarah Musea DIY, 1985), hlm. 48.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁵ *Ibid.*

Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat 5 September 1945. Dalam amanat tersebut terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan kedudukan Yogyakarta dalam Republik Indonesia, yaitu: (1) bahwa secara struktur pemerintahan, Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia; (2) secara administratif, Sultan Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah yang memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat. Dalam keadaan darurat pada masa mempertahankan kemerdekaan RI, segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat dan kuasa-kekuasaan lainnya dipegang seluruhnya oleh Sultan Hamengkubuwono IX; (3) hubungan antara Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab atas Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat langsung kepada Presiden Republik Indonesia.²⁶ Yogyakarta masih tetap mempertahankan nilai budaya politik tradisional yaitu monarki, namun demi kelancaran penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Kesultanan Yogyakarta bersedia patuh pada konstitusi tertinggi Negara Republik Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 dengan penyesuaian budaya lokal Yogyakarta.

Amanat yang sama dikeluarkan pula oleh Paku Alam VIII pada hari yang sama untuk daerah kekuasaannya. Kedua amanat ini merupakan pernyataan politik yang mengandung nilai historis, karena dengan demikian berakhirlah daerah kerajaan yang sudah mempunyai tradisi cukup lama di daerah Jawa Tengah dan sekaligus memperlihatkan sikap jiwa dari kedua penguasanya.²⁷ Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, misalnya kerajaan Surakarta, ternyata Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi baru setelah proklamasi kemerdekaan.

Amanat Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari pemerintah pusat di Jakarta. Terbukti keesokan harinya tanggal 6 September 1945, utusan dari pemerintah yaitu Menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. Maramis datang ke Yogyakarta untuk menyampaikan "Piagam Penetapan" mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari RI yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 19 Agustus 1945. Isi pokok dari Piagam Penetapan tersebut adalah ucapan terima kasih dan penghargaan

sebesar-besarnya dari pemerintah RI kepada Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman yang telah berjuang menjaga dan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia.²⁸ Secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah RI menerima Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia tanpa melalui syarat apapun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang berdiri dengan sistem demokrasi modern dan model republik, tetapi masih mempertahankan nilai budaya politik tradisional dengan memasukkan sebuah wilayah pemerintahan monarki, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

Setelah dikeluarkannya Amanat pada tanggal 5 September 1945 dan Piagam Penetapan pada 19 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono XI, Paku Alam VIII, dan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Yogyakarta sebagai wakil rakyat memegang kekuasaan di seluruh Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang kemudian menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kekalahan Jepang melawan sekutu dalam Perang Dunia II berakibat pada penyerahan kembali wilayah jajahan yang dikuasai Jepang kepada sekutu, termasuk Indonesia. Jepang berkewajiban menjaga status quo atas Indonesia sampai dengan kedatangan Belanda ke Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdampak positif pada perjuangan rakyat Indonesia mengusir bangsa asing dari wilayah RI. Salah satunya perebutan kekuasaan antara Jepang dengan rakyat Yogyakarta secara serentak pada tanggal 26 September 1945. Pada tanggal 27 September 1945 semua gedung-gedung pemerintahan Jepang dan semua perusahaan yang dikelola oleh Jepang telah direbut oleh rakyat. Pada hari itu juga terbit surat kabar *Kedaulatan Rakyat*. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* merupakan surat kabar pertama yang terbit dalam Negara Republik Indonesia sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Surat kabar *Merdeka* di Jakarta baru terbit pada tanggal 1 Oktober 1945.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 gedung yang dipergunakan untuk tempat tinggal Gubernur Jepang telah diduduki oleh KNI Daerah Yogyakarta dan selanjutnya dipergunakan untuk kantor KNI Daerah Yogyakarta. Pada tanggal 6 Oktober 1945 Badan Keamanan Rakyat (BKR) mengepung dan menyerbu Markas Militer Jepang di Kotabaru. Setelah terjadi pertempuran dengan korban beberapa pemuda Indonesia, kekuasaan Jepang dapat direbut oleh rakyat sehingga tanggal 7 Oktober 1945 Yogyakarta sudah dapat dibebaskan dari kekuasaan penjajah.

²⁶ Berita Indonesia tahun 1945-1950, hlm. 273.

²⁷ Badan Musyawarah Musea DIY, *op. cit.*, hlm.

²⁸ Berita Indonesia tahun 1945-1950, hlm. 43.

Sejak tanggal 7 Oktober 1945 kekuasaan Jepang di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat dinyatakan dan itu artinya kekuasaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah kembali ketangan Bangsa Indonesia, maka pada tanggal 30 Oktober 1945 dikeluarkannya Amanat yang kedua oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII. Dalam amanat tersebut mengandung beberapa pernyataan, antara lain: (1) kekuasaan-kekuasaan yang dahulu dipegang oleh Pemerintah jajahan (dalam jaman Belanda dijalankan oleh Gubernur dengan kantornya, dalam jaman Jepang oleh Kooti Zimu Kyoku Tyookan dengan kantornya) telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali pada Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII; (2) tidak perlu adanya Sub-Comisariat dalam daerah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman; (3) Komite Nasional Daerah Yogyakarta telah membentuk suatu Badan Pekerja yang dipilih dari anggota-anggotanya, atas kehendak rakyat dan panggilan massa yang disertai untuk menjadi Badan Legislatif (Badan Pembuat Undang-undang) serta turut menentukan haluan jalannya Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Daerah Yogyakarta; (4) Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta semufakat dan sependapat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta memutuskan bahwa (a) jalannya pemerintahan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; (b) Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta adalah suatu Badan Legislatif (Badan Pembuat Undang-undang) yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat dalam Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat undang-undang dan menentukan haluan jalannya Pemerintahan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kehendak rakyat. Meskipun dengan status monarki, tapi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Dengan demikian Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam lingkup daerah, tapi masih berada dalam pengawasan pemerintah RI.²⁹

Amanat 30 September 1945 berisi penyerahan kekuasaan legislatif kepada Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta.³⁰ Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menyerahkan kekuasaan kepada rakyat agar pemerintahan di Yogyakarta dapat selaras dengan Dasar Negara RI yaitu UUD 1945. Amanat tersebut menyatakan bahwa Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta dianggap sebagai wakil rakyat karena disertai tugas untuk menjadi badan legislatif.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 277-278.

³⁰ Ardian Kresna, *op. cit.*, hlm. 333.

Amanat tersebut terlihat bahwa Sultan Hamengkubuwono IX tidak lagi menonjolkan Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alam VIII tidak lagi menonjolkan Kadipaten Pakualaman, namun sudah mulai menonjolkan adanya satu daerah baru yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan gabungan dari Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sejak saat itu segala macam Maklumat yang dikeluarkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa ditandatangani oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam, sehingga tidak mengherankan sampai saat ini susunan kepemimpinan daerah pada jabatan kepala daerah (Gubernur) dan wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) masih bersifat garis keturunan darah dari keluarga Kesultanan Yogyakarta sebagai Gubernur dan keluarga Kadipaten Pakualaman sebagai wakil Gubernur.³¹

Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia dengan melenyapkan pemerintahan RI. Aksi Belanda ditujukan di Jakarta atas dasar bahwa suatu negara dimata internasional harus mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan, sehingga Belanda mengganggu jalannya pemerintahan di Jakarta. Situasi Jakarta yang tidak aman mengakibatkan ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Pada malam hari, tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya beserta keluarga naik kereta api istimewa dari jalan kereta api di belakang rumah Presiden Soekarno. Tentara Belanda memeriksa semua kereta api yang masuk dan keluar. Gerbong para pemimpin RI tidak digandengkan dengan gerbong lain dan dibiarkan gelap, sehingga patroli-patroli Inggris dan Belanda mengira gerbong tersebut kosong. Esok paginya mereka tiba di Yogyakarta. Di Kesultanan Yogyakarta mereka disambut tidak saja oleh rakyat, tetapi juga oleh Sultan Yogya dan Adipati Pakualaman.³² Sejak tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta menjadi ibukota RI. Gedung Agung adalah istana kepresidenan yang digunakan Presiden Soekarno di Yogyakarta.³³

Pada tanggal 7 Januari 1946, KNI Daerah Yogyakarta mengadakan upacara penyambutan kedatangan Presiden dan Wakil Presiden di kota tersebut. Diantara hadirin nampak Sri Sultan Hamengkubuwono, Paku Alam, opsir-opsir Tentara Keamanan Rakyat (TKR), bupati-bupati, kepala kepolisian dan wakil-wakil seluruh organisasi di Yogyakarta. Dalam upacara penyambutan itu Presiden

³¹ KPH. MR. Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 29.

³² Willard Hanna, *Hikayat Jakarta*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 231.

³³ Badan Musyawarah Musea DIY, *op. cit.*, hlm. 51.

Soekarno mengatakan bahwa kepindahannya ke Yogyakarta adalah kepindahan sementara.³⁴

Alasan dipilihnya Yogyakarta sebagai alternatif ibukota karena beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 5 September 1945 Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman bermaklumat bahwa seluruh rakyat Yogyakarta setia kepada negara.³⁵ Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan agar ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Sultan menjamin keamanan dan keselamatan para pemimpin RI untuk melanjutkan perjuangan.³⁶ Dukungan Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman terhadap RI adalah pertama kali dilakukan oleh penguasa lokal di Indonesia.

Kesultanan Yogyakarta adalah sebagai pusat pergerakan (revolusi) yang tidak lepas dari peran Sultan Hamengkubuwono IX. Kebesaran hati Sultan membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang bangsawan, melainkan juga negarawan yang berpikir maju. Kerelaan untuk menyediakan Gedung Agung untuk menjalankan pemerintahan RI di Yogyakarta merupakan wujud janji Sultan untuk ikut mempertahankan kemerdekaan.³⁷ Ketegasan seorang Sultan untuk menopang perjuangan Soekarno-Hatta serta jaminan keamanan oleh masyarakat saat itu menjadi penentu nasib RI selanjutnya.

Menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota merupakan suatu pilihan yang tepat. Semangat kemerdekaan yang tinggi dari penduduk dan yang ditunjang oleh sikap tegas dari Sri Sultan merupakan modal yang sangat besar. Yogyakarta berada dalam suasana demam kemerdekaan, sehingga nampak rakyatnya menyambut peristiwa itu dengan semangat yang tinggi.

Ali Sastroamijoyo memberikan gambaran bahwa suasana Yogyakarta waktu itu adalah suasana kebebasan dan keamanan. Terasa sekali sebagai suatu kota yang hidup di tengah-tengah pergolakan revolusi. Banyak pemuda-pemuda berambut gondrong dan bersenjata masih berkeliaran. Pada umumnya pakaiannya compang-camping. Sikap dan tingkah laku mereka masih seperti pejuang-pejuang yang baru saja menang perang. Pemuda yang jaya, kuat, dan gagah berani menghadapi musuh atau siapa pun yang menentang negara dan bangsanya, atau... pribadinya sendiri dan golongan atau kelompoknya. Pemuda-pemuda rambut panjang, pejuang-pejuang bersenjata yang tak terkenal nama-namanya dan dengan tingkah laku yang serba serampangan inilah yang merupakan kekuatan revolusi kita. Tanpa para pemuda

pejuang mungkin sejarah kemerdekaan negara kita akan lain kesudahannya.³⁸

Pada tanggal 27 September 1945, pemuda-pemuda pegawai Kesultanan mengadakan rapat di Balai Harsono Kepatihan. Dalam pertemuan itu dibentuk organisasi yang diberi nama Pemuda Kita Kesultanan disingkat Pekik dan dicetuskan mosi yang berbunyi sebagai berikut: (1) angkatan muda dari pegawai Kesultanan selalu berdiri di belakang Sri Paduka Kanjeng Sultan, siap sedia menjalankan segala perintah dan petunjuknya; (2) berjanji, jika ada kekuasaan asing yang hendak memerintah dan menjajah Indonesia, atas titah Sri Paduka hamba sekalian sanggup serentak meletakkan jabatan; (3) berjanji akan memelihara dan mempertahankan tetapnya kemerdekaan Indonesia sampai akhir zaman.³⁹ Hal tersebut mencerminkan pengorbanan dan pengabdian yang begitu besar oleh rakyat Yogyakarta terhadap berdirinya Negara Republik Indonesia yang berdaulat.

Pada tanggal 13 Oktober 1945, para abdi dalem Pakualaman mengadakan rapat sebagai upaya bersama untuk mempersatukan kesultanan Yogyakarta dan kadipaten Pakualaman untuk berjuang demi mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berdaulat. Dalam pertemuan itu dibentuk organisasi yang diberi nama Persatuan Para Abdi Dalem Praja Pakualaman. Pertemuan tersebut menghasilkan mosi yang nadanya hampir serupa dengan mosi Pekik yang berbunyi sebagai berikut: (1) para Abdi Dalem Praja Pakualaman harus teguh bersatu padu dalam lingkungan Negara Republik Indonesia Merdeka, tetap mencurahkan segala tenaga, jiwa dan raga membela Indonesia Merdeka; (2) tetap setia dan berdiri di belakang Sri Paduka Ngarsa Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Paku Alam VIII yang telah mendapat penuh kepercayaan Presiden Republik Indonesia; (3) serentak meletakkan jabatannya jika bangsa lain memerintah Indonesia.⁴⁰ Hal tersebut merupakan bukti bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan satu kesatuan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya setia dan tunduk kepada Negara Republik Indonesia.

Penyusunan kekuatan militer sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk agar seluruh masyarakat dapat ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di

³⁴ Osman Raliby, *op. cit.*, hlm. 188.

³⁵ Kolumnis dan Wartawan Kompas, *op. cit.*, hlm. 175-176.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 178.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, *op. cit.*, hlm. 339.

³⁹ Badan Musyawarah Musea DIY, *op. cit.*, hlm. 50.

⁴⁰ *Ibid.*,

Yogyakarta dibentuk barisan-barisan atau Laskar-laskar Rakyat. Tujuan bentuknya laskar-laskar rakyat itu adalah untuk membantu TKR menghadapi musuh dan menampung semangat rakyat yang sedang bergelora yang ingin ikut membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia.⁴¹

Rakyat Yogyakarta sangat bersemangat ikut membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII telah melaksanakan langkah yang tepat yaitu dengan memerintahkan semua lapisan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan keamanan umum, kemudian membentuk Laskar Rakyat pada tanggal 26 Oktober 1945. Tujuan dikeluarkannya Maklumat No. 8 pada tanggal 7 Desember 1945 adalah untuk menyempurnakan peraturan tentang Laskar Rakyat demi tegaknya Negara Republik Indonesia dan tercapainya perdamaian dunia.

B. Dampak Dari Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta Ke Yogyakarta Bagi Pemerintah RI

Sejak perpindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta, para pemimpin RI dilindungi oleh Kesultanan Yogyakarta, sedangkan rakyat di Jakarta tidak dapat bergerak karena adanya Belanda. Perdana Menteri Sutan Syahrir masih menetap di Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dilakukannya diplomasi dengan pihak Belanda.

Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI melalui berbagai proses, yaitu perjanjian Hooze Veluwe pada tanggal 14-25 April 1946, konferensi di Malino (Sulawesi Selatan) pada tanggal 15-25 Juli 1946, konferensi di Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946, Perjanjian Linggajati pada tanggal 12 November 1946, Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947, dibentuknya Komisi Tiga Negara (KTN), perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, dibentuknya *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) pada tanggal 29 Mei 1948, Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, Serangan Umum TNI pada 1 Maret 1949, Perjanjian Roem Royen pada tanggal 7 Mei 1949, dan BFO mengadakan Konferensi Inter Indonesia (KII) dalam rangka persiapan menuju Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 menghasilkan beberapa persetujuan, yang terpenting ialah penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada RIS. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Nederland diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Pada saat itu juga terbentuklah negara RIS. Pada tanggal 28 Desember 1949 ibukota RI kembali ke Jakarta.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 57.

Belanda telah memblokir wilayah RI yang hampir sepenuhnya tertutup perdagangan dengan wilayah-wilayah di luar negeri. Alasan yang dikeluarkan Belanda sudah jelas bahwa blokade adalah usaha untuk menghancurkan RI melalui ekonomi. Akibat dari blokade yang diharapkan oleh Belanda adalah timbulnya keadaan sosial ekonomi yang buruk dan kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan. Inflasi yang tak terkendali diharapkan akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan sosial, sehingga dapat menimbulkan kebencian terhadap pemerintah RI.

Usaha yang dilakukan pemerintah RI untuk menembus blokade Belanda salah satunya adalah mengeluarkan uang kertas yang terkenal dengan Oeang Repoebliek Indonesia (ORI) untuk mengganti mata uang Jepang. Kurs mata uang Jepang dengan ORI adalah satu perseribu, setiap seribu rupiah mata uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah ORI. Untuk sementara pemerintah hanya mengizinkan setiap keluarga memiliki Rp. 300,- saja dan bagi yang tidak berkeluarga Rp. 100,-.

C. Dampak Dari Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta Ke Yogyakarta Bagi Kesultanan Yogyakarta

Sumber hukum bagi Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa kali mengalami perubahan. Sumber hukum dari Daerah Istimewa Yogyakarta ialah pasal-pasal dalam UUD 1945 dan UUDS tahun 1950. Salah satunya adalah Undang-undang RI No. 22 Tahun 1948 yang mengatur tentang pembagian negara dan kedudukan daerah istimewa dalam tiga pasal, yaitu pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 18 ayat 5 dan 6, dan pasal 19.

Inflasi yang terjadi di Yogyakarta berdampak terhadap kehidupan kaum bangsawan. Kekurangan perumahan dan bangunan yang gawat di Yogyakarta sangat membantu kaum bangsawan dalam mengatasi masalah keuangannya. Banyak keluarga bangsawan yang menyewakan tempat kediamannya kepada sejumlah sekolah atau kantor untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka juga menjual rumah besarnya dan pindah ke rumah biasa sambil menanamkan sebagian uangnya pada berbagai perusahaan dagang baru.⁴²

Perpindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta menyebabkan berpindahnya para pemimpin, para pegawai, dan sekian banyak republikein untuk melanjutkan perlawanan kepada Belanda. Perpindahan penduduk itu menyebabkan bertambahnya penduduk kota Yogyakarta dari 170.000 jiwa menjadi 600.000 jiwa.⁴³

⁴² Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2009), hlm. 141.

⁴³ *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, op. cit., hlm. 338 – 339.

Bertambahnya penduduk di Yogyakarta juga dialami setelah perjanjian Renville. Penduduk dari berbagai daerah mengungsi ke Yogyakarta karena kekurangan pangan akibat blokade Belanda.

Pendudukan Belanda di Jakarta mengakibatkan hilangnya kekuasaan Indonesia atas universitas-universitas yang telah ada.⁴⁴ Oleh karena itu, pada tanggal 13 Maret 1946, Universitas Gajah Mada dibuka di Yogyakarta.⁴⁵ Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan bagian depan istananya sebagai tempatnya. Salah seorang penasihat Sultan yang terdekat di Yogyakarta yaitu Selo Soemardjan mengatakan bahwa revolusi tidak mungkin mendobrak pintu-pintu istana, karena pintu-pintu itu sudah terbuka lebar.⁴⁶

Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan memiliki peranan dan potensi yang besar dalam memberikan sumbangan dan pembangunan. Para pelajar yang datang ke Yogyakarta dari berbagai daerah menjadikan daerah ini sebagai media dan tempat interaksi yang dapat melahirkan jiwa persatuan dan kesatuan.

PENUTUP

Simpulan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan terjadilah pertempuran dan bentrokan-bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat kekuasaan Jepang. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Kedatangan NICA (Netherland Indies Civil Administration)/Belanda membonceng Sekutu/Inggris ke Indonesia pada tanggal 29 September 1945 bertujuan untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Belanda melaksanakan teror-terornya kepada para pemimpin bangsa Indonesia di Jakarta. Pihak Sekutu/Inggris sama sekali tidak menghalangi setiap aksi yang dilakukan oleh Belanda dengan tentara NICA-nya, bahkan memberikan bantuan dan dorongan sepenuhnya. Dengan suasana demikian para pemimpin tidak akan dapat melaksanakan tugasnya, maka pada tanggal 4 Januari 1946 ibukota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat pada 5 September 1945 yang berisi pernyataan bahwa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa Negara RI. Dengan demikian Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menempatkan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dalam Negara RI. Kedatangan Belanda ke Indonesia dan meneror para

pemimpin bangsa mengakibatkan terhambatnya jalan pemerintahan dan akhirnya Sultan Hamengkubuwono IX menyusulkan agar ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Rakyat Yogyakarta pun mendukung pemerintah RI. Mereka bersiap siaga ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Yogyakarta yang dijadikan sebagai Ibukota negara RI untuk sementara waktu, ternyata mempunyai dampak yang sangat berarti bagi Pemerintah RI dan Kesultanan Yogyakarta, diantaranya dampak bagi pemerintah RI yaitu Perdana Menteri Sutan Syahrir tetap di Jakarta untuk melaksanakan tugasnya, pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda, dan munculnya Oeang Repoebliek Indonesia (ORI) akibat blokade Belanda.

Dampak bagi Kesultanan Yogyakarta yaitu dikeluarkannya Undang-undang RI No. 22 Tahun 1948 oleh Pemerintah RI yang mengatur tentang kedudukan daerah istimewa, inflasi melanda Yogyakarta yang berdampak terhadap kehidupan kaum bangsawan. Banyak keluarga bangsawan yang menyewakan tempat kediamannya kepada sejumlah sekolah atau kantor untuk mendapatkan penghasilan tambahan, perpindahan penduduk ke Yogyakarta menyebabkan bertambahnya penduduk kota Yogyakarta dari 170.000 jiwa menjadi 600.000 jiwa, dibukanya Universitas Gajah Mada, dan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan.

Saran

Sebaik apapun penulisan dalam jurnal ini, penulis merasa masih banyak kekurangan. Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini diharapkan kepada pembaca yang memiliki minat untuk mengadakan penelitian selanjutnya hendak mencari dan mengumpulkan sumber yang lebih lengkap. Selain itu hendaknya para pembaca mencari sumber yang lebih valid dan lebih lengkap dari yang sudah ada, sehingga hasil penelitian akan lebih sempurna dari yang sebelumnya.

Jurnal ini diharapkan mampu menjadi motivator bagi para pembaca yang akan melakukan penulisan tentang sejarah masa Revolusi Fisik (1945-1949) khususnya keadaan bangsa Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan dan berusaha untuk melengkapi penelitian yang penulis lakukan. Akhir kata semoga penulisan jurnal ini berguna bagi pembaca sekalian.

Daftar Pustaka

Arsip :

Penyambutan kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta. Notulen rapat penyambutan, biaya penyambutan, persiapan-persiapan penyambutan kedatangan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dari pengasingan.

Surat kabar :

⁴⁴ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 462.

⁴⁵ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 486.

⁴⁶ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 463.

- Berita Antara, 5 Januari 1946, "Pengumuman Pemerintah RI dan Berita Republik Indonesia".
- Berita Indonesia, 5 Januari 1946, "Penjelasan Tentang Kediaman Presiden dan Wakil Presiden di luar kota dan Berita Republik Indonesia".
- Berita Republik Indonesia tahun 1945-1950.
- Kedaulatan Rakjat, 5 Januari 1946, "Susunan Baru Dalam Pemerintahan Agung".
- Merdeka, 5 Januari 1946, "Pengumuman Pemerintah RI, Berita Republik Indonesia, dan Penjelasan Tentang Kediaman Presiden dan Wakil Presiden di luar kota".
- Min Poo, 5 Januari 1946, "Pengumuman Pemerintah RI".
- Ra'jat, 5 Januari 1946, "Pengumuman Pemerintah RI dan Berita Republik Indonesia".
- Buku :**
- Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950. 1975. Jakarta : Badan Pimpinan Harian Pusat (BPHP) Korp Cacat Veteran Republik Indonesia.
- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press.
- Ardian Kresna. 2011. *Sejarah Panjang Mataram : Menengok Berdirinya Kesultanan Yogyakarta*. Yogyakarta : Diva Press.
- Badan Musyawarah Musea DIY. 1985. *Sejarah Perjuangan : Yogya Benteng Proklamasi*. Yogyakarta : Badan Musyawarah Musea DIY.
- Cindy Adams. 1966. *Bung Karno : Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Hadisutjipto. 1995. *Bara Dan Nyala Revolusi Fisik Di Jakarta*. Jakarta : Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Kementerian Penerangan. 1953. *Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raja*. Jakarta : Kementerian Penerangan.
- Kolumnis dan Wartawan Kompas. 2012. *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat*. Jakarta : Buku Kompas.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mohammad Hatta. 1982. *Memoir*. Jakarta : Tintamas Indonesia.
- Osman Raliby. 1953. *Documenta Historica : Sejarah Dokumenter Dari Pertumbuhan Dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.
- Selo Soemardjan. 2009. *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Sidik Kertapati. 2000. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta : Pustaka Pena.
- Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH. MR. 1984. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Warmansjah, G.A. 1997. *Sejarah Revolusi Fisik Daerah DKI Jakarta*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Willard Hanna. 1988. *Hikayat Jakarta*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
1997. *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.